

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdullah, M. Afif. *Politik Hukum Ratifikasi Konvensi HAM di Indonesia: Upaya Mewujudkan Masyarakat yang Demokratis*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005).
- Asfar, Muhammad. *Pemilu dan Perilaku Memilih 1955-2004*. (Surabaya: Pustaka Eureka, 2006).
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme*. (Jakarta: Konstitusi Press, 2005).
- Budiarjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. (Jakarta:PT.Gramedia,2008).
- _____. *Demokrasi di Indonesia Demokrasi Parlemen dan Demokrasi Pancasila*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009).
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka,1989).
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka,1989).
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka,1989).
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif, dalam Justifikasi Teori Hukum*. Cetakan I. (Jakarta: Prenada Media Group, 2016).
- Erwin, Muhammad. *Pendidikan Kewarganegaraan Republik Indonesia*. (Bandung: Refika Aditama, 2010).
- Fuady, Munir. *Konsep Negara Demokrasi*. (Bandung: Refika Aditama, 2010).
- Gramedia. *Ke arah Indonesia Merdeka*. (Jakarta:Gramedia,1982).
- Gulo, W. *Metodologi Penelitian*. (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004).
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 987).

- Harmawan, Eman & Umaruddin Masdar. *Demokrasi Untuk Pemula*. (Yogyakarta: Kajian dan Layanan Informasi untuk Kedaulatan Rakyat, 2000).
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. (Jakarta: RajaGrafindo,2006).
- Huda, Ni'matul. *Hukum Tata Negara*. (Jakarta: Raja Grafindo,2009).
- _____. *Hukum Tata Negara Indonesia*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008).
- Kansil, CST dan Christine ST Kansil. *Ilmu Negara*. (Jakarta: Pradnya Paramita, 2007).
- Karim, M. Rusli. *Pemilu Demokrasi Kompetitif*. (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 1991).
- Kusnardi, Moh. dan Harmaily Ibrahim. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. (Jakarta: Pusat Studi HTN-UI,1988).
- M, Moh. Taufik. *Pokok – Pokok Hukum Acara Perdata*. Cetakan ke 1. (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004).
- Mayo, Henry B. *An Introductionn to Democratic Theory*. (New York: Oxford University Press,1960).
- Rahardjo, Satijpto. *Ilmu Hukum*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000).
- Rasaid, M. Nur. *Hukum Acara Perdata*. Cetakan ke-3. (Jakarta: Sinar Grafika, 2003).
- Retnami, Setya. *Makalah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*. (Jakarta: Kantor Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia, 2001).
- Romli, Lili dan Sri Yuniarti. “*Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum; Studi Kasus Jawa Tengah*”. (Jakarta: P2P LIPI,2004).
- _____. “*Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum; Studi Kasus Jawa Tengah*”. (Jakarta:P2P LIPI,2004).
- Rosyada, Dede et.al. *Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. (Jakarta: Prenada Media, 2005).
- Saragih, Bintan R. *Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum Di Indonesia*. (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1987).

Sarundajang. *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*. Cetakan ke 3. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan).

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet ke-3. (Jakarta: UI Press, 1986).

Syafiie, Inu Kencana. *Pengantar ilmu pemerintahan*. (Jakarta: Refika Aditama, 2010).

Winardi, Sirajuddin. *Dasar-dasar Hukum Tata Negara Indonesia*. (Malang: Setara Press, 2015).

Witjaksono, Aiman. “*Dibalik Kemenangan Kotak Kosong di Makasar yang Jadi* Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cetakan ke-3. (Jakarta: UI Press, 2010).

B. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. *Undang-Undang Nomor Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada*.

Pasal 142 ini termasuk Pasal yang tidak berubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Peraturan KPU No.12 Tahun 2015 tentang pencalonan pemilihan gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota beberapa kali direvisi dan terakhir menjadi peraturan KPU No. 15 Tahun 2017 tentang pencalonan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

C. Internet

Anonim. “*Putusan Hakim Atau Putusan Pengadilan*”. www.lontar.ui.ac.id, diakses 25 Februari 2019.

_____. “*Pemilihan Umum*”. http://id.hukumpedia.org/wiki/Pemilihan_umum, 28 juni 2019.

_____. “*Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*”. http://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_kepala_daerah_dan_wakil_kepala_daerah, 29 juni 2019.

Sejarah". <https://regional.kompas.com/read/2018/07/09/09271671/di-balik-kemenangan-kotak-kosong-di-makassar-yang-jadi-sejarah?page=all>, diakses 9 Mei 2019.

D. Jurnal

Bisariyadi, dkk. "*Komparasi Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilu di Beberapa Negara Penganut Paham Demokrasi Konstitusional*". Jurnal Konstitusi Volume 9. Nomor 3. September 2012.

Gaffar, Janedjri M. *Politik Hukum Pemilu dan Demokrasi Konstitusional*. (Jakarta: Konstitusi Press, 2012).

Setiadi, Wicipto. "*Peran Politik Politik dalam Penyelenggaraan Pemilu yang Aspiratif dan Demokratis*". Jurnal Legislasi Indonesia Vol.5 No.1-Maret 2008.